

# Etika Jurnalistik dan Jurnalisme Bencana pada Pemberitaan Gunung Agung di Portal Berita *Balipost.com*

**Redi Panuju**

Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Jl. Semolowaru 84 Surabaya 60118  
Email: redi.panju@unitomo.ac.id

**Abstract:** *This study discusses the news of Gunung Agung disaster in Balipost.com from the aspect of journalism ethics and disaster journalism. Disaster journalism is required to report disaster objectively, though media cannot be separated from business goals. Ethnographic content analysis is conducted as research method. The result shows that Balipost.com has applied the principle of journalism code of ethics and the principles of disaster journalism. The news tend not to use in-depth reporting, which is less thorough, lack of direct observation results, but it averts the violation of ethics.*

**Keywords:** *disaster, ethics, ethnography, news, online.*

**Abstrak:** *Studi ini membahas pemberitaan bencana Gunung Agung di Balipost.com dari aspek etika jurnalistik dan jurnalisme bencana. Jurnalisme bencana dituntut untuk memberitakan bencana secara objektif, sementara media tidak terlepas dari tujuan bisnis. Studi ini menggunakan metode analisis isi etnografi. Hasil kajian menunjukkan Balipost.com telah menerapkan asas kode etik jurnalistik dan kaidah jurnalisme bencana. Pemberitaan Balipost.com cenderung tidak menggunakan reportase mendalam sehingga berita kurang mendalam, minim hasil observasi langsung, namun terhindar dari pelanggaran etik.*

**Kata Kunci:** *bencana, berita, etika, etnografi, online.*

Pada September hingga Desember 2017, aktivitas vulkanik Gunung Agung di Pulau Bali menarik perhatian jurnalis. Bencana alam seperti ini mempunyai nilai berita tinggi karena menyangkut tragedi yang mengancam jiwa manusia dan lingkungannya. Tradisi jurnalistik menganggap bahwa liputan terhadap fenomena semacam ini selevel dengan liputan di medan perang karena keduanya mempunyai risiko tinggi bagi jurnalisnya.

Selain memiliki daya tarik bagi khalayak, jurnalisme bencana juga

memiliki fungsi memperingatkan. Menurut Panuju (2005, h. 8), fungsi memperingatkan berkaitan dengan aktivitas memproduksi informasi yang berguna bagi masyarakat untuk mengingatkan masyarakat mengenai potensi bahaya yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan tepat agar selamat dari bencana.

Pemberitaan Gunung Agung berguna bagi masyarakat Bali maupun luar Bali. Bagi masyarakat Bali, pemberitaan dapat membimbing perilaku yang tepat saat Gunung Agung mengeluarkan asap dan

lahar dengan semburan mencapai puluhan kilometer. Penduduk yang berdomisili di sekitar kawasan Gunung Agung bisa segera mengevakuasi diri meninggalkan rumahnya tanpa menunggu instruksi dari pejabat negara. Jumlah pengungsi saat Gunung Agung meletus pada 29 November 2017 mencapai 43.358 jiwa dan tersebar di 229 titik pengungsian (Erdianto, 2017). Sementara itu, bagi masyarakat di luar Bali, pemberitaan Gunung Agung akan berpengaruh pada tingkat kunjungan masyarakat ke Bali, misalnya untuk kegiatan bisnis dan wisata. Bali merupakan kawasan destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Data Dinas Pariwisata Denpasar tentang perkembangan wisatawan domestik dan mancanegara yang menginap di Kota Denpasar pada 2016 berjumlah 625.431 orang. Sementara itu, hingga Oktober 2017, jumlah wisatawan menginap sebanyak 246.106. Data tersebut menunjukkan penurunan kunjungan wisatawan hampir sebesar 60 persen (Suparta, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologisnya.

Pemberitaan media yang komprehensif dapat meminimalkan korban jiwa dan

kerugian karena masyarakat dapat mengambil sikap dan tindakan yang antisipatif. Susanto (2011a, h. 5) menyebutkan bahwa penanganan bencana bukan semata-mata mengandalkan kemampuan untuk memberikan bantuan materiel saja, tetapi juga memberikan dukungan moral.

Komunikasi yang berpedoman pada etika dan substansi komunikasi sangat esensial dalam proses pemberian bantuan terhadap masyarakat terdampak bencana. Misalnya, ketika maskapai penerbangan mengubah jadwal penerbangan akibat aktivitas Gunung Agung, banyak calon penumpang yang salah mengantisipasi. Calon penumpang yang tidak memperbarui informasi melalui media datang langsung ke Bandar Udara Ngurah Rai dengan harapan tidak ada perubahan pada jadwal penerbangannya. Maskapai pun tidak memberitahukan perubahan jadwal penerbangan. Akibatnya, para calon penumpang telantar di bandara selama lebih dari 24 jam. Calon penumpang yang mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Agung melalui pemberitaan media dapat menelepon biro perwakilan kantor maskapai untuk menanyakan kepastian jadwal penerbangan. Informasi melalui pemberitaan media dapat menghindarkan calon penumpang dari situasi buruk.

Khalayak informasi tidak sekadar menempatkan pemberitaan sebagai sumber informasi tentang peristiwa, namun juga sebagai pedoman penyusunan agenda. Hal ini sesuai dengan fungsi utama jurnalisme bencana, yaitu membantu masyarakat dan pihak lain dalam penanggulangan bencana. Prajarto (2008, h. 6) mengemukakan

bahwa jurnalis mempunyai tanggung jawab menghimpun hingga menyajikan masalah mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan perbaikan seputar bencana. Namun, menurut Prajarto (2008, h. 10), banyak jurnalis yang terjebak pada keasyikan membesarkan peristiwa melalui informasi mengenai banyaknya korban. Bencana semakin dibesar-besarkan seiring semakin banyaknya korban. Korban bencana hanya dilihat sebagai *magnitude* sebuah berita. Peliputan bencana semacam itu dapat meniadakan fakta-fakta potensial. Sebaliknya, menempatkan bencana sebagai sebuah tragedi dapat menguatkan gejala traumatis masyarakat, baik korban maupun penerima informasi.

Martam (2009, h. 2) menyatakan bahwa trauma berarti luka atau kekagetan (*syok*). Penyebabnya dapat berupa peristiwa yang sangat menekan, terjadi tiba-tiba, di luar kontrol/kendali seseorang, dan sering kali membahayakan kehidupan atau mengancam jiwa. Peristiwa traumatis ini mengagetkan, menyakitkan, dan melebihi situasi stres sehari-hari. Ciri-cirinya adalah terjadi secara tiba-tiba, mengerikan, menimbulkan perasaan takut yang mendalam, mengancam keutuhan fisik maupun mental, serta dapat menimbulkan dampak yang sangat membekas pada fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku, baik bagi mereka yang mengalami ataupun menyaksikan.

Pemberitaan yang kurang akurat dan cenderung mengedepankan sensasi untuk meraih jumlah khalayak dianggap sebagai praktik jurnalistik yang kurang mempertimbangkan dampak psikologis khalayak. Susanto (2011b, h. ix) menyata-

kan bahwa komunikasi bencana yang tidak dilandasi rasa tanggung jawab sosial berpotensi menimbulkan bencana komunikasi.

Kurangnya tanggung jawab sosial pemberitaan dapat berasal dari beberapa kemungkinan (Panuju, 2002, h. 43). Pertama, intervensi kekuatan politik dan kekuasaan formal. Kekuatan politik acap kali memiliki kepentingan tertentu terhadap informasi untuk tujuan pencitraan. Kekuatan tersebut dapat mengintervensi reporter dan editor untuk menyetir pemberitaan ke arah tertentu. Kedua, intervensi pelaku bisnis (ekonomi). Para pelaku bisnis memiliki kepentingan memengaruhi media untuk mengembargo sebuah informasi yang dipandang dapat merugikan bisnisnya. Sebaliknya, para pelaku bisnis tersebut mendorong tersebarnya suatu informasi yang dipandang menguntungkan bisnisnya. Ketiga, kepentingan bisnis media yang memainkan pemberitaan dalam rangka menaikkan jumlah khayalak serta pemasang iklan. Keempat, kurangnya pengetahuan dan integritas awak media yang berimplikasi pada produksi berita yang melanggar kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik, menurut Ichlasul Amal (dalam Sukardi, 2008, h. xvi), merupakan hasil pergumulan hati nurani wartawan. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berarti pengkhianatan terhadap hati nurani profesi wartawan. Pelanggaran ini adalah perbuatan tercela bagi setiap wartawan.

Di samping faktor di atas, kompetensi wartawan juga signifikan. Banyak wartawan tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan

jurnalistik yang memadai saat peliputan. Akibatnya, karya jurnalistik para wartawan tersebut berpotensi menjadi masalah di masyarakat. Oleh karena itu, pada 2004, Dewan Pers menerbitkan Standar Kompetensi Wartawan yang digunakan sebagai bahan pelatihan kewartawanan. Manan (2010, h. x) menyatakan bahwa hanya wartawan yang memenuhi Standar Kompetensi Wartawan-lah yang layak menjalankan pekerjaan kewartawanan. Dengan demikian, peran wartawan dalam menjalankan tugasnya bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, kini muncul kecenderungan pergeseran aktivitas masyarakat dalam mencari informasi dari media cetak ke media *online* (siber). Data Dewan Pers hingga Februari 2017 menunjukkan bahwa terdapat 43.000 media siber di Indonesia (Tim Okezone, 2017), sedangkan media cetak hanya berjumlah 1.254 penerbitan (Sufyan, 2017). Media siber semakin mengalahkan media cetak. Sufyan memprediksi media siber tumbuh hingga 6% per tahun, sementara media cetak 4-6% per tahun (Sufyan, 2017).

Transformasi media cetak ke siber diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengintegrasikan berbagai macam media dalam satu pola interaksi komunikasi. Jan van Dijk (2012, h. 49-54) menyatakan bahwa komunikasi antarmanusia yang dinahkodai oleh internet menjadi dasar teknik jaringan sosial yang baru (*technical foundations of the network society*).

Pola pemberitaan media cetak dapat diasumsikan sudah relatif baik karena adanya pola pembinaan etika jurnalistik,

baik oleh institusi media bersangkutan maupun asosiasi wartawan, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tulisan ini ingin menggambarkan tentang tradisi pemberitaan jurnalistik siber terkait implementasi kode etik jurnalistik dan juga kaidah jurnalisme bencana.

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan intertekstualitas dengan metode analisis isi etnografi. Menurut David L. Atheide, analisis isi etnografi digunakan untuk melihat dokumen (dalam hal ini teks di media siber) dan memahami makna dari komunikasi yang terjadi. Analisis isi etnografi merefleksikan objek penelitian dalam beberapa model pertukaran informasi, format, ritme, gaya, dan aspek lainnya (Nasrullah, 2014, h. 185).

Teks yang diteliti adalah berita mengenai bencana Gunung Agung di Bali pada periode terbit September-Desember 2017 di portal *Balipost.com*. *Balipost.com* dipilih karena berdasarkan data *Alexa.com*, media ini adalah situs di Bali yang paling banyak dikunjungi, yaitu mencapai 186.378 pengunjung. Empat media siber lain mengikutinya, yaitu *Suluhbali.co* dengan 173.222 pengunjung, *Nusabali.com* dengan 165.109 pengunjung, *Beritabali.com* dengan 154.208 pengunjung, dan *Metrobali.com* dengan 125.689 pengunjung (Bbn, 2017).

Penelitian ini menganalisis teks berita yang dihubungkan dengan kaidah jurnalisme bencana dan nilai etis dari kode etik jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007, kaidah jurnalisme bencana meliputi: (1) tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana, (2) kesiapsiagaan merespons bencana, (3) respons upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana, (4) pemulihan, yaitu upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers 2006 yang digunakan adalah pasal 1 (akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk), pasal 3 (tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi), dan pasal 4 (tidak membuat berita sadis).

## HASIL

### Tinjauan Berdasarkan Tahapan Mitigasi

Berita *Balipost.com* yang memenuhi kaidah jurnalisme bencana dan meringankan dampak bencana dapat dilihat pada tabel 1.

Pada periode September 2017, berita di *Balipost.com* cenderung berisi

rencana pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan meletusnya kembali Gunung Agung. Berdasarkan berita di atas, *Balipost.com* telah mengonstruksi pemberitaan awal bencana Gunung Agung dengan rasional. Pemerintah dan pihak lain ikut berpartisipasi dalam meringankan beban akibat bencana, sehingga diharapkan tumbuh optimisme. Pembaca diajak turut waspada terhadap meletusnya kembali Gunung Agung dan diimbau bermukim di radius 12 kilometer di tempat yang sudah disediakan. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, juga rajin memberikan motivasi melalui media agar masyarakat tidak panik menghadapi segala kemungkinan.

Pada tahap dua, setelah erupsi Gunung Agung meningkat, pemerintah memperpanjang siaga darurat sampai 26 Oktober. Tabel 2 memperlihatkan berita di *Balipost.com* yang menunjukkan kesiapsiagaan merespons bencana.

**Tabel 1 Daftar Berita Mitigasi Tahap 1**

No	Judul Berita	Edisi
1	BNPB Sediakan 15 Ribu Masker, Siaga Darurat Gunung Agung Diperpanjang	23 September 2017
2	Status Awas, BNPB Larang Warga Beraktivitas Hingga Radius 12 Km dari Gunung Agung	25 September 2017
3	Penanganan Bencana Gunung Agung, Pemerintah Pusat Akan Terus Beri Pendampingan	26 September 2017
4	Menhub Salurkan Bantuan Pengungsi Gunung Agung	28 September 2017
5	2.443 Ekor Sapi di KRB Gunung Agung Dievakuasi	29 September 2017

Sumber: *Balipost.com*

**Tabel 2 Berita Kesiapsiagaan Merespons Bencana**

No	Judul Berita	Edisi
6	Diguyur Hujan Deras Tiga Hari, Gunung Agung Keluarkan Solfatara Hingga 1.500 Meter	8 Oktober 2017
7	Gempa Tremor Non Harmonik Gunung Agung Makin Panjang	19 Oktober 2017
8	Status Gunung Agung Belum Turun, Magma Sudah Capai 4 Kilometer	20 Oktober 2017
9	Darurat Penanganan Pengungsi Gunung Agung Diperpanjang Lagi hingga 9 November	28 Oktober 2017
10	Pengungsi Gunung Agung Gelar Upacara Tiga Bulanan di Posko Bung Tomo	3 November 2017

Sumber: *Balipost.com*

Pada tahap mitigasi kedua, *Balipost.com* menginformasikan secara serial keadaan Gunung Agung mulai dari bahaya solfatara, gempa tremor, dan semburan magma. Informasi semacam ini disebut *warning function* dalam konteks jurnalistik, yaitu berita yang memberi peringatan kewaspadaan pada masyarakat mengenai segala kemungkinan yang terjadi. Berita 10 menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan nasib pengungsi. Selain itu, terdapat berita yang bersifat religius untuk menguatkan mental para pengungsi. Berita tersebut dapat menggugah rasa empati yang membangkitkan simpati dalam bentuk mobilisasi bantuan, apabila dibaca oleh masyarakat yang bukan korban.

Tabel 3 menunjukkan mitigasi ketiga, yaitu respons meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana di *Balipost.com*.

Berita pada tabel 3 menunjukkan *Balipost.com* menstrukturkan berita semakin meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Agung. Pemerintah memberikan banyak imbauan untuk meminimalkan

bahaya akibat bencana (berita 15). Langkah strategis lainnya adalah menutup Bandar Udara Ngurah Rai untuk sementara waktu.

Tabel 4 menunjukkan mitigasi tahap empat, yakni mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula di *Balipost.com*.

Pada tahap pemulihan ini, *Balipost.com* mengonstruksikan berita promosi untuk meyakinkan calon wisatawan bahwa Bali telah aman. Pada perspektif mitigasi, *Balipost.com* telah memenuhi standar pemberitaan jurnalistik bencana.

#### Tinjauan Berdasarkan Etika Jurnalistik

Hasil pengamatan peneliti terhadap berita 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menunjukkan bahwa tidak ditemukan pencampuran fakta dan opini. Namun, pada berita 7, ditemukan pencampuran fakta dan opini yang terindikasi pada kalimat “Namun sayang, dari pemantauan visual, asap kawah tak dapat diamati.” (Parananda, 2017a). Kata “namun sayang” lebih menekankan kekecewaan jurnalis terhadap keadaan yang ada. Ekspektasi jurnalis pun tidak terpenuhi karena jurnalis berharap dapat

**Tabel 3 Respons Meminimalkan Bahaya**

No	Judul Berita	Edisi
11	Gunung Agung Siaga, 2.536 Warga Masih Mengungsi di Rendang	14 November 2017
12	Sepekan Terakhir Begini Aktivitas Gunung Agung	18 November 2017
13	Gunung Agung Erupsi Freatik Lagi Pukul 19.13 Vona Berwarna Orange	25 November 2017
14	BNPB Prediksi Lahar Dingin Gunung Agung Bertambah Banyak, Ini Imbauannya	28 November 2017
15	Soal Bandara Ngurah Rai Tutup, Keselamatan Nomor Satu	30 November 2017

Sumber: *Balipost.com*

**Tabel 4 Berita Mengembalikan Kondisi Masyarakat Seperti Semula**

No.	Judul	Edisi
16	Nusa Penida Festival Yakinkan Pariwisata Aman, Momentum Pelestarian Alam	6 Desember 2017
17	Manfaatkan Sosmed untuk Promosikan Bali Aman	9 Desember 2017
18	ITDC Gelar NDLF	9 Desember 2017

Sumber: *Balipost.com*

mengamati asap kawah. Meskipun unsur opini ditemukan, namun porsi kecil dan tak berdampak.

Pada berita 8, opini jurnalis teridentifikasi pada kalimat:

Meski jumlah kegempaan yang terjadi mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi status Gunung Agung hingga Sabtu (21/10) masih tetap dinyatakan berada di level awas. Status awas belum diturunkan ke siaga mengingat data deformasi, GPS maupun data pendukung lainnya menunjukkan bahwa aktivitas gunung yang agresif. (Parananda, 2017b)

Kata “meski” menunjukkan pendapat jurnalis bahwa tindakan pemerintah kurang benar karena tidak meningkatkan status Gunung Agung. Interpretasi tersebut didasarkan pada data pada kalimat berikutnya:

Berdasarkan analisis Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM, posisi magma sudah berada di jarak 4 kilometer dari sebelumnya jauh di bawah. (Parananda, 2017b)

Berita ini mengandung opini jurnalis karena penetapan status Gunung Agung merupakan kewenangan pemerintah, bukan berdasarkan posisi magma di jarak 4 kilometer. Namun opini jurnalis dalam berita tersebut tidak menyesatkan pembaca dan justru menambah kewaspadaan pembaca. Pencampuran fakta dan opini tidak selalu bersifat negatif.

Pada berita 9, opini jurnalis teridentifikasi pada frasa:

Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan selama status awas Gunung Agung cukup besar. (Devita, 2017)

Potongan kalimat tersebut menunjukkan ketidakjelasan pengutipan narasumber, se-

hingga terkesan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat jurnalis.

Pada berita 10, opini jurnalis teridentifikasi pada frasa:

Meski secara sederhana, pelaksanaan upacara ini juga sebagai wujud perhatian warga desa setempat bersama yayasan Forum Sekar Kota Denpasar serta Pemkot Denpasar. (Asmara, 2017)

Pengertian “sederhana” adalah sesuatu yang relatif. Bagi jurnalis, barang kali pelaksanaan upacara tersebut sederhana, namun bagi warga barang kali pelaksanaan upacara merupakan pengorbanan yang maksimal. Sementara itu, pada berita 11 dan 12, tidak ditemukan pencampuran fakta dan opini.

Pada berita (13) ditemukan opini pada kalimat:

Beberapa nampak serius mengamati asap yang diperkirakan berasal dari erupsi. Namun demikian, warga belum berencana mengungsi karena masih menunggu imbauan resmi pemerintah. (Parananda, 2017d)

Opini muncul pada frasa “asap yang diperkirakan” yang tidak menunjukkan kejelasan sumbernya. Selain itu, terdapat frasa “belum berencana” yang dikaitkan dengan “imbau resmi dari pemerintah”. Frasa-frasa tersebut memunculkan pertanyaan, misalnya “Dari mana jurnalis tahu bahwa warga belum mempunyai rencana?” dan “Dari mana jurnalis tahu bahwa warga masih menunggu imbauan pemerintah?” Berita tersebut benar apabila ada kutipan dari warga. Kutipan tersebut bisa menerangkan beberapa hal, misalnya warga sudah punya rencana, tetapi memiliki keyakinan yang berbeda karena percaya pada mitos tertentu. Permana, Setyowati,

Slamet, dan Juhadi (2017) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat lereng Gunung Merapi terhadap mitos membuat masyarakat mempunyai rencana khusus dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, konfirmasi yang dilakukan oleh jurnalis terhadap sumber berita dapat menghindari subjektivitas jurnalis.

Analisis pada berita 14, 15, 16, 17, dan 18 tidak ditemukan pencampuran fakta dan opini. Secara keseluruhan, *Balipost.com* sedikit melakukan pelanggaran pada kategori pencampuran fakta dan opini. Hal itu pun tidak terlalu signifikan karena hanya menyangkut pilihan kata yang kurang tepat.

#### **Analisis Etnografi Bencana**

Berita-berita yang dianalisis mengindikasikan narasumber-narasumber dalam mitigasi bencana sebagai berikut:

1. Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) dengan kutipan,

“Yang pertama, yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab kita. Saya ingin menekankan sekali lagi agar masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan yang kedua dari Gunung Agung agar dibantu secara maksimal dari semua sisi.” (Hardianto, 2017b)

2. Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) dengan kutipan,

“Saya mewakili Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada para pengungsi korban erupsi Gunung Agung. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi bencana ini.” (Nikson, 2017)

3. I Made Mangku Pastika (Gubernur Bali) dengan kutipan,

“Yang perlu dipersiapkan saat ini adalah kesiapan masyarakat maupun pemerintah

daerah maupun provinsi ketika terjadi kemungkinan terburuk.”

4. Sutopo Purwonugroho (Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan kutipan,

“Bantuan pasti akan terus bertambah, apalagi kalau sampai betul-betul meletus, bahkan ketika pasca bencana pun BNPB bersama Kementerian/Lembaga (K/L) pasti akan memberikan bantuan.” (Hardianto, 2017a)

5. Arif Yahyan (Menteri Pariwisata) dengan kutipan,

“Hasilnya, Aman! Ikuti saran Pemerintah, jangan masuk ke zona merah, 9-12 km. Dan Pemerintah sudah menyiapkan beberapa skenario yang kemungkinan terjadi. Termasuk mengantarkan sampai bandara terdekat,” ungkap Arief Yahya. (Kmb, 2017)

6. I Wayan Suardana (Direktur RSUD Karangasem) dengan kutipan,

“Apabila terjadi suatu kejadian darurat, kalau diperlukan tambahan tenaga relawan nanti tinggal dilaporkan lebih lanjut sesuai kebutuhan kepada Dinas Kesehatan.” (Bagiarta, 2017)

7. Kamil Devy Syahbana (Sub Bidang Mitigasi Gunung Api Wilayah Timur) dengan kutipan,

“Masyarakat dihimbau tetap tenang. Jangan panik dan terpancing isu-isu menyesatkan. PVMBG akan terus memberikan informasi terkini. BNPB, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, SKPD, relawan, dan semua unsur terkait akan memberikan penanganan pengungsi.” (Parananda, 2017c).

Data etnografis menunjukkan jajaran pemerintah pusat maupun daerah tanggap dalam mitigasi bencana. Bahkan pemain bisnis yang terkait dengan komunikasi, seperti *provider* seluler ikut terlibat dalam menyebarkan informasi mitigasi.

## PEMBAHASAN

Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006 Pasal 1 mengatur tentang berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Tafsir berimbang dalam pemberitaan bukan hanya dilihat dari kesempatan yang diberikan oleh jurnalis kepada para pihak yang terlibat dalam peristiwa (*cover both sides*). Namun juga konteks seperti hal pesimis-optimis, tragedi-keberuntungan, dan nestapa-bahagia, sehingga keseimbangan dalam jurnalistik tidak hanya perihal pengaturan substansi berita, namun juga terkait tujuan jurnalistik, yakni pertanggungjawaban sosial. Berita harus memiliki *sense of crisis* bagi khalayaknya. Berita harus mampu membuat keseimbangan dalam situasi yang tidak seimbang. Itulah yang disebut pertanggungjawaban sosial pers (Panuju, 2002, h. 52).

Pada berita 1, konteks berimbang dapat ditemukan pada penjelasan narasumber tentang setiap gunung memiliki karakteristik yang berbeda melalui perbandingan dengan Gunung Sinabung. Gunung Sinabung tetap meletus berkali-kali dengan letusan kecil, meskipun status awas sudah ditetapkan. Hal ini membuat pembaca bersugesti bahwa Gunung Agung tidak membahayakan. Pada berita 2, konteks berimbang ditemukan pada tindakan pemerintah pusat maupun daerah dalam memberikan bantuan. Pada berita 5, keseimbangan ditunjukkan dengan penyelamatan korban, baik manusia maupun ternak. Pada berita 10, keseimbangan tampak pada para pengungsi yang melakukan upacara tiga bulanan di

posko penampungan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelamatan diri dari bencana bukan hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga permohonan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa.

Sementara itu, akurasi pemberitaan dimaknai sebagai ketepatan jurnalis dalam melaporkan peristiwa sesuai dengan fakta, tidak melebihkan, dan tidak mengurangkan. Konteks akurasi dapat ditemukan pada penulisan data, seperti “radius 12 kilometer” (berita 1), “2.443 ekor sapi” (berita 4), “keluarkan solfatara hingga 1.500 meter” (berita 6), “2.653 warga masih mengungsi di Rendang” (berita 11), “Gunung Agung erupsi freatik lagi pukul 19.13” (berita 13).

Sementara itu, dalam hal pencatatan identitas narasumber, *Balipost.com* sangat cermat, sehingga tidak ditemukan kalimat seperti, “menurut sumber yang dapat dipercaya”, “menurut pengakuan salah seorang pengungsi”, dan “dari pengamatan di lapangan”. Hal ini menunjukkan adanya kecermatan pencatatan jurnalis terhadap informasi tentang data. Apabila tidak cermat, kata-kata yang muncul dapat berupa “2 ribuan ekor sapi”, “tengah malam”, “di sekitar lereng gunung”, dan kata lain yang pengertiannya tidak definitif.

Menurut Dewabrata (2004, h. 103), berita yang tidak akurat tidak bisa dipegang kebenarannya, sehingga tidak pantas dipercaya. Media massa yang berulang kali menyajikan berita tidak akurat akan kehilangan kepercayaan dan ditinggalkan khalayaknya.

Teks yang diteliti tidak menunjukkan berita yang mengindikasikan itikad

buruk *Balipost.com*. Contoh berita yang mengindikasikan itikad buruk adalah berita yang menjelek-jelekan narasumber dan memutarbalikkan fakta yang dapat mengakibatkan seseorang merasa tercemar namanya.

Sedangkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006 Pasal 3 menjadi pedoman wartawan untuk tidak mencampurkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa, keadaan, dan sifat yang ada. Sedangkan opini adalah pandangan subjektif jurnalis terhadap realitas. Apabila jurnalis terlalu dalam memaknai sesuatu, maka berita akan jauh dari realitas. Oleh karena itu, jurnalis mencari makna pesan melalui orang yang mengalami, menyaksikan, atau memiliki keahlian sesuai objeknya. Opini yang berasal dari sumber berita tetap dapat ditoleransi. Pandangan sumber berita diasumsikan merepresentasikan realitas.

Widyandani (2014, h. 81) meneliti berita reklamasi Teluk Benoa di harian *Bali Post* dan menemukan adanya pencampuran fakta dan opini sebanyak 51%. Fakta ini menarik untuk dikonfirmasi dalam berita *Balipost.com* yang notabene berasal dari perusahaan yang sama.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Mengapa hasil analisis ini berbeda saat pemberitaan reklamasi di Teluk Benoa?” Hal ini dapat terjadi karena menyangkut tema pemberitaannya. Pada berita reklamasi Teluk Benoa, masyarakat terbagi menjadi dua pihak yang setuju dan tidak setuju, sehingga *Bali Post* secara institusional memandang perlu memihak pada salah satu pihak yang berpolemik.

Opini menjadi senjata jurnalis untuk mempertahankan diri. Keberpihakan kepada salah satu pihak merupakan bagian dari politik berita untuk mempertahankan dan meluaskan jumlah pembacanya. Sementara itu, kasus pemberitaan Gunung Agung tidak mengandung pro-kontra, kecuali persoalan keprihatinan. Jurnalis tidak memiliki kepentingan tertentu kecuali membantu masyarakat menginformasikan perkembangan aktivitas Gunung Agung.

*Balipost.com* mampu meminimalkan pencampuran fakta dan opini, namun belum dapat menampilkan berita mendalam maupun investigatif. Berita-berita yang muncul cenderung merupakan berita pendek yang materi utamanya berasal dari keterangan narasumber, seperti pihak otoritas penerbangan dan gubernur. Laksono (2010, h. 12) membuat deskripsi perbedaan antara berita reguler, mendalam, dan investigasi. Berita reguler adalah laporan yang menceritakan “apa” (*what*), “siapa” (*who*), “mengapa” (*why*), “di mana” (*where*), “kapan” (*when*), dan “bagaimana” (*how*) atau 5W + 1H sebagai informasi bagi publik. Laporan mendalam adalah laporan yang menceritakan tentang “bagaimana” dan “mengapa” sebuah peristiwa terjadi. Sedangkan laporan investigasi merupakan laporan yang lebih menjelaskan mengenai “apa” dan “siapa” yang terlibat dalam sebuah peristiwa.

Sementara itu, Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006 Pasal 4 menjadi pedoman wartawan untuk tidak membuat berita “sadis”. Pemberitaan yang mengandung unsur “sadis” tidak ditemukan dalam 18

berita yang diteliti. Berita “sadis” cenderung berlaku pada peristiwa kriminalitas, seperti pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Foto kondisi masyarakat dalam pengungsian yang memperlihatkan situasi darurat lebih dimaknai sebagai musibah.

Berita “sadis” cenderung muncul karena pemberitaan terhadap peristiwa hasil perbuatan antara manusia dengan manusia, manusia terhadap binatang, binatang terhadap binatang, atau binatang terhadap manusia. Kondisi tersebut dapat memuat unsur kesengajaan ingin melukai, meniadakan, dan menghilangkan pihak lain. Sementara itu, bencana merupakan situasi yang tidak bisa dikontrol oleh akal budi manusia. Kontrol yang bisa dilakukan manusia dalam situasi bencana adalah saling membantu untuk mengurangi dampak bencana atau mencari cara untuk meminimalkan dampak dari bencana.

Sementara itu, analisis etnografi dapat didasarkan pada salah satu tulisan menarik tentang pendekatan etnografi bencana karya empat orang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



**Gambar 1** Situasi di Pengungsian Korban Gunung Agung

Sumber: *Balipost.com*, 21 November 2017

(LIPI), M. Alie Humaedi, Sari Seftiani, Saiful Hakam, dan Jane Kartika Propiona (2016). Tulisan mereka membahas persoalan peran kepemimpinan lokal tradisional dalam upaya pengurangan risiko bencana. Penyebab kebencanaan dan upaya pengurangan risikonya tidak hanya dilihat sebagai peristiwa fisik saja, tetapi harus dibaca, dipahami, dan diatasi secara sosial kebudayaan. Aspek ini menjadi penting karena manusia adalah subjek terdampak bencana yang tidak bisa dilepaskan dari sistem kebudayaan.

Analisis isi etnografi, menurut Atheide (1987, h. 68), digunakan untuk melihat dokumen (dalam hal ini teks di media siber) dan memahami makna dari komunikasi yang terjadi. Melalui analisis isi kualitatif ini, peneliti dapat menunjukkan bahwa pemberitaan *Balipost.com* memperlihatkan pihak-pihak yang turut serta dalam mitigasi bencana dan hal-hal yang dilakukan.

Pengamatan terhadap berita di *Balipost.com* tidak menunjukkan adanya berita mengenai partai politik yang memanfaatkan bencana Gunung Agung untuk pencitraan. Padahal sebelumnya, bencana selalu dikaitkan dengan pencitraan politik, sehingga muncul anekdot pajangan bendera parpol yang tingginya dua kali lipat ketimbang tumpukan sumbangan sembako. Politisi kerap kali memanfaatkan air mata (Panuju, 2015, h. 6).

## SIMPULAN

*Balipost.com* sebagai portal berita siber yang paling banyak dikunjungi warganet di Bali telah menerapkan kaidah jurnalisme

bencana dengan baik. Hal ini dibuktikan dari keteraturan dalam menginformasikan perkembangan bencana Gunung Agung. *Balipost.com* turut membantu mitigasi bencana, baik periode prabencana sebelum letusan, saat letusan terjadi, maupun saat mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula.

*Balipost.com* pun telah menerapkan prinsip kode etik jurnalistik. Berita di *Balipost.com* bertumpu pada informasi dari sumber berita sahih, sehingga terhindar dari pencampuran fakta dan opini. Temuan berbeda muncul pada penelitian sebelumnya soal pemberitaan reklamasi Teluk Benoa di koran *Bali Post*. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh fenomena atau korporasi berbeda. Pada liputan reklamasi Teluk Benoa, kasus menjadi kontroversi di masyarakat. Ada indikasi koran *Bali Post* memiliki misi khusus dengan memasukkan opini dalam fakta. Opini dapat menjadi pertanda pemihakan kepada salah satu pihak yang berpolemik. Koran *Bali Post* memilih berpihak pada pihak yang menolak reklamasi untuk tujuan yang idealis, menggaet pasar pembaca, ataupun pembeli iklan.

Meskipun modal kedua perusahaan tersebut berasal dari korporasi yang sama, namun manajemen jurnalistiknya berbeda. Keduanya memiliki reporter dan penerbitan berbeda. *Balipost.com* diperbarui dalam hitungan jam, sementara koran *Bali Post* dalam hitungan *deadline* 24 jam.

Pemberitaan *Balipost.com*, dilihat dari segi etnografi, mengonstruksikan kesan pemerintah pusat, mulai dari presiden, menteri, gubernur, pihak polda,

BNPB, hingga pelaku bisnis sepekat membantu penanganan bencana Gunung Agung. Berita merupakan salah satu bagian yang digunakan dalam mitigasi bencana. Informasi yang benar dan tepat dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dan ketenangan dalam menghadapi bencana. Para politisi, baik pengurus partai maupun individu yang akan berlaga dalam Pilkada 2018, tidak ada yang memanfaatkan bencana Gunung Agung sebagai sarana pencitraan.

### Saran

Kesan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers 2006 pasal 3 tentang pencampuran fakta dan opini dapat dihindari oleh *Balipost.com* dengan mengevaluasi teknik penulisan beritanya, terutama pilihan kata yang tepat. Penulisan berita diupayakan tetap konsisten berdasarkan keterangan sumber berita, baik format narasi maupun deskripsinya.

Meskipun tidak banyak ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya, tetapi *Balipost.com* belum menyajikan berita mendalam dan investigatif. *Balipost.com* bisa melakukan peliputan mendalam maupun investigatif pada kasus-kasus penting minimal satu kali dalam seminggu. Hasil pengamatan etnografi mendorong *Balipost.com* juga memuat pernyataan dari masyarakat luas, bukan hanya pejabat maupun orang ternama. Sebuah realitas adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan bukan hanya pernyataan-pernyataan dari orang penting. Sebuah fenomena tidak selalu bisa dipersonifikasikan dengan individu tertentu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asmara. (2017, 3 November). Pengungsi Gunung Agung gelar upacara. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/11/03/26781/Pengungsi-Gunung-Agung-Gelar-Upacara...html>>
- Atheide, D. L. (1987). Ethnographic content analysis. *Qualitative Sociology*, 10(1), 65-77.
- Bagiarta. (2017, 29 November). RSUD Karangasem siapkan tim siaga bencana. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/11/29/29756/RSUD-Karangasem-Siapkan-Tim-Siaga...html>>
- Bbn.(2017,25 Juli).Ini 5 situs berita online terpercaya di Bali. *Beritabali.com*. <<https://beritabali.com/read/2017/07/25/201707250016/Ini-5-Situs-Berita-Online-Terpercaya-di-Bali.html>>
- Dewabrata, A. M. (2004). *Kalimat jurnalistik: Panduan mencermati berita*. Jakarta, Indonesia: PT Kompas Media Nusantara.
- Devita, R. (2017, 28 Oktober). Darurat penanganan pengungsi Gunung Agung. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/10/28/26298/Darurat-Penanganan-Pengungsi-Gunung-Agung...html>>
- Erdianto, K. (2017, November 29). Gunung Agung meletus, pengungsi mencapai 43.358 jiwa. *Kompas.com*. <<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/18373761/gunung-agung-meletus-pengungsi-mencapai-43358-jiwa>>
- Hardianto. (2017a, 26 September). Penanganan bencana Gunung Agung, pemerintah pusat akan terus beri pendampingan. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/09/26/22904/Penanganan-Bencana-Gunung-Agung,Pemerintah...html>>
- Hardianto. (2017b, 3 Oktober). Jangka panjang, pemerintah harus pikirkan sumber pendapatan pengungsi. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/10/03/23693/Jangka-Panjang,Pemerintah-Harus-Pikirkan...html>>
- Humaedi, M. A., Seftiani, S., Hakam, S. & Propiona, J. K. (2016). *Etnografi bencana: Menakar para pemimpin lokal dalam mengurangi resiko bencana*. Yogyakarta, Indonesia: LKis.
- Kmb. (2017, 7 Oktober). Yakin pariwisata aman, aktris luar negeri ramai-ramai ke Bali. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/10/07/24161/Yakin-Pariwisata-Aman,Aktris-Luar...html>>
- Laksono, D. D. (2010). *Jurnalisme investigasi*. Bandung, Indonesia: Kaifa.
- Manan, B. (2010). *Standar kompetensi wartawan*. Jakarta, Indonesia: Dewan Pers.
- Martam, I. S. (2009). Mengenali trauma pasca bencana. *Newsletter Pulih*, 14, 1-4. <[http://disasterchannel.co/wp-content/uploads/2015/06/news\\_letter\\_14.pdf](http://disasterchannel.co/wp-content/uploads/2015/06/news_letter_14.pdf)>
- Nikson. (2017, 28 September). Menhub salurkan bantuan pengungsi Gunung Agung. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/09/28/23169/Menhub-Salurkan-Bantuan-Pengungsi-Gunung...html>>
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan riset media siber*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Panuju, R. (2002). *Relasi kuasa*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Panuju, R. (2005). *Nalar jurnalistik*. Malang, Indonesia: Bayu Media Publishing.
- Panuju, R. (2015, 6 Januari). Jurnalisme air mata, jurnalisme tak beretika. *Kompas*, h. 6.
- Parananda, E. (2017a, 19 Oktober). Gempa tremor nonharmonik gunung Agung. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/10/19/25318/Gempa-Tremor-Nonharmonik-Gunung-Agung...html>>
- Parananda, E. (2017b, 21 Oktober). Status Gunung Agung belum turun. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/10/21/25580/Status-Gunung-Agung-Belum-Turun...html>>
- Parananda, E. (2017c, 22 November). PVMBG akui letusan freatik Gunung Agung sebabkan abu berintensitas tipis. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/11/22/28829/PVMBG-Akui-Letusan-Freatik-Gunung...html>>

- Parananda, E. (2017d, 25 November). Gunung Agung erupsi freatik lagi pukul 19.13. WIB, vona berwarna orange. *Balipost.com*. <<http://www.balipost.com/news/2017/11/25/29281/Gunung-Agung-Erupsi-Freatik-Lagi...html>>
- Permana, S. A., Setyowati, D. L., Slamet, A., & Juhadi. (2017). Community rituals in facing volcanic eruption threat in Java. *UNNES Journals*, 9(1), 29–36.
- Prajarto, N. (2008). Bencana, informasi, dan keterlibatan media. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(3), 1- 24.
- Sufyan, M. (2017, 7 Juli). Berapa lama lagi usia koran di Indonesia? *Kompas.com*. <<http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/18590671/berapa.lama.lagi.usia.koran.di.indonesia>>
- Sukardi, W. A. (2008). *Cara mudah memahami kode etik jurnalistik & dewan pers*. Jakarta, Indonesia: Dewan Pers.
- Suparta, I. K. (2017, November 27). Gunung meletus pengaruhi kunjungan wisatawan. *antaranews.com*. <<https://www.antaranews.com/berita/667547/gunung-agung-meletus-pengaruhi-kunjungan-wisatawan>>
- Susanto, E. H. (2011a). Eksistensi komunikasi dalam menghadapi bencana. Dalam Setio Budi HH, *Komunikasi Bencana* (h. 3-20). Yogyakarta, Indonesia: Buku Litera, ASPIKOM, dan Perhumas BPC Yogyakarta.
- Susanto, E. H. (2011b). Komunikasi bencana dan bencana komunikasi. Dalam Setio Budi HH, *Komunikasi Bencana* (h. ix-xii). Yogyakarta, Indonesia: Buku Litera, ASPIKOM, dan Perhumas BPC Yogyakarta.
- Tim Okezone. (2017, Februari 19). Dewan Pers: Ada 43.000 media online yang terdata, 500 terdaftar, 7 terverifikasi. *Okezone.com*. <<https://news.okezone.com/read/2017/02/19/337/1622468/dewan-pers-ada-43-000-media-online-yang-terdata-500-terdaftar-7-terverifikasi>>
- van Dijk, J. (2012). *The Network Society*. 3<sup>rd</sup> Edition. London, UK: SAGE Publication.
- Widyandani, M. I. (2013). *Berita lingkungan dalam pemberitaan kasus reklamasi Teluk Benoa Bali di surat kabar Bali Post periode 27 Juni 2013 – 18 Agustus 2013*. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia. <<http://e-journal.uajy.ac.id/5376/>>